

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* merupakan fenomena internasional yang menyerang semua negara. Khususnya tindakan *fraud*, yang merupakan salah satunya kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata bisnis dunia. Di pemerintahan Indonesia sudah mencapai tingkatan yang sangat memprihatinkan. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Rahmawati, 2012). Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan sendiri. Kecurangan terjadi karena tekanan untuk melakukan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Kecurangan akuntansi akhir-akhir ini semakin sering terjadi di Indonesia, baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa pada sektor swasta kecurangan terjadi pada ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana, sedangkan pada sektor pemerintahan kecurangan terjadi dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecurangan akuntansi akan menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang nyata atau sebenarnya. Pada umumnya, korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kecurangan akuntansi. Soepardi (2011) dalam Ramidha (2016) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam karena keterlibatan beberapa unsur

yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan dan penyalahgunaan kepercayaan. Berdasarkan dalam fenomena yang ada banyak hasil dari sebuah program kerja tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan seperti halnya data dari ICW (Indonesia Corruption word, 2017) mengungkapkan pada tahun 2017 modus penyebab kerugian negara yang paling banyak adalah penyalahgunaan anggaran. Ada 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 Triliun dengan modus ini. Berdasarkan sektornya, penyalahgunaan anggaran desa merupakan sektor paling banyak dengan total 98 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 39,3 Miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara sebesar Rp 255 Miliar dan Rp 81,8 Miliar.

Salah satu yang sudah dipidanakan di Kabupaten Pamekasan yang baru-baru ini yang menjadi fenomena yaitu kasus kecurangan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat didalam organisasi pemerintahan. Kasus tersebut adalah terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa untuk menutupi kasus tersebut maka dilakukannya suap sebesar Rp. 250.000.000. Para pelaku adalah pejabat dilingkungan pemerintahan, diantaranya kepala daerah selaku pemimpin dari pemerintahan, kepala Inspektorat dan Kabid sebagai bagian pengawasan dan pengendalian pemerintah, kepala desa sebagai pengguna anggaran, dan kejaksaan sebagai pelindung hukum dalam kasus ini. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang secara singkat diartikan sebagai tindakan yang disengaja dalam menyalahgunakan sumber daya pemerintah demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya ICW memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya, perlunya keefektifan

pengendalian internal untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang merupakan kecurangan dalam organisasi.

Kecurangan akuntansi bisa membawa keburukan dengan tidak memberikan pelayanan publik secara baik untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Kemal, et.al, 2015). Pemerintahan yang bebas dari *fraud* akan mendapatkan kepercayaan dari pihak publik dari proses penganggaran dan realisasi pengelolaan keuangan negara. Ebebhoahon, et.al (2015) mengemukakan salah satu negara yang bebas *fraud* mengharuskan lembaga publik membuat laporan keuangan sesuai dengan realisasi dan kenyataan yang terjadi untuk menggambarkan transparansi dalam keuangan, sehingga pihak publik dapat mempercayainya.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi diantaranya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari, et.al (2015), Eliza (2015), Ratnadi (2017), Ardiana (2016), Najahningrum (2013), dan Udayani (2017) yang meneliti pengendalian internal yang menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Bukti penelitian ketaatan aturan akuntansi sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan oleh Ardiana (2016), Shintadevi (2017), Toyibatun (2009) dan Prasetyo (2013). Peneliti tentang asimetri informasi dilakukan oleh Ardiana (2016), Najahningrum (2013), dan Prasetyo (2013).

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi tersebut, Sari, et.al (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan

terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat menjadi kecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan efektifitas pengendalian untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan yang menyebabkan kecurangan akuntansi.

Kurangnya pengendalian internal dalam tata kelola perusahaan menjadi kontributor utama untuk penipuan. Sejalan dengan Eliza (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal yang baik dapat menjadi metode pencegahan dalam program anti *fraud* di pemerintah daerah. Tidak efektifnya pengendalian internal ditunjukkan dengan alat kontrol yang rendah karena tidak berfungsinya pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pengendalian internal di pemerintah daerah. Udayani (2017) juga menerangkan bahwa pengendalian internal dibagi menjadi lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring. Hasil tersebut menyatakan bahwa pengendalian internal menjadi faktor pertama yang mempengaruhi manajemen resiko *fraud*.

Untuk mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi diperlukan sebuah efektifitas pengendalian internal yang baik. Bukti empiris yang dilakukan Najahningrum, (2013) menjelaskan, jika suatu sistem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada akan menyebabkan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya

kegiatan-kegiatan operasional organisasi serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil (Sari,et.al, 2015; Ratnadi, 2017; Udayani, 2017 dan Ardiana, 2016).

Beberapa peneliti lainnya memberikan pernyataan yang berbeda diantaranya Dewi,et.al (2017) dari penelitiannya menjelaskan bahwa semakin baik pengendalian internal yang dimiliki oleh instansi maka belum sepenuhnya mencegah tingkat kecurangan akuntansi yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan jika pimpinan dan staf akuntansi dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam perusahaan akan tetapi belum bisa mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi. Frilia (2015) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kecurangan terjadi karena adanya kesempatan, semakin besar peluang kesempatan untuk melakukan kecurangan maka semakin sering pula kecurangan yang akan terjadi. Lemahnya pengendalian internal akan membukakan pintu untuk melakukan kecurangan. sistem pengendalian internal yang lemah, membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan sebuah organisasi, karena tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun dan sebaliknya. Selain beberapa peneliti diatas yang menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risky, (2017) dan Adelin, (2013).

Selain pengendalian internal yang menjadi pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan

faktor yang mempengaruhi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Shintadevi (2017) menyatakan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin taat aturan akuntansi pada suatu instansi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam instansi tersebut. Bukti empiris yang dilakukan oleh Ardiana (2016) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada organisasi. Ketika peraturan ditaati maka suatu organisasi akan terbebas dari indikasi terjadinya kecurangan, ketika penyampaian laporan keuangan harus sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku.

Beest (2009), menyatakan bahwa aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Pada dasarnya tidak ada organisasi yang terbebas dari *fraud* (kecurangan).

Ebobhoahon,et. al (2015) dalam penelitiannya menyatakan, bahwa mematuhi aturan dalam penyusunan keuangan akan mengurangi terjadinya kecurangan atau menghentikan kegiatan yang akan merugikan organisasi. Semakin taat anggota organisasi terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka peluang untuk terjadinya *fraud* akan semakin rendah (Prasetyo, 2013). Hal ini karena dengan ditaatinya aturan akuntansi yang berlaku maka kegiatan pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan dan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan akan lebih mudah terdeteksi. Pernyataan diatas tersebut

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiana, 2016; Toyibatun, 2009; dan Dewi,et.al, 2017). Pernyataan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi tidak sejalan dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Risky (2017) yang menyatakan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor (Azmi, 2017). Karena tidak dapat dideteksi inilah ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh (Indiastutik, 2016; dan Sari,at.al 2015).

Laporan keuangan publik menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada para pengguna informasi keuangan. Ketika ada ketidak selarasan informasi antara agen dan prinsipal maka akan terjadi asimetri informasi. Sebuah bukti empiris menyatakan bahwa asimetri informasi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Najahningrum (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketika ada kepentingan pribadi antara agen dan prinsipal terhadap informasi, maka akan terjadilah asimetri informasi. Tetapi ketika informasi yang dihasilkan oleh agen memberikan kejelasan dengan tanggung jawab yang tinggi dari pihak organisasi maka prinsipal akan menerima informasi yang dihasilkan oleh agen. Sebaliknya jika informasi yang dihasilkan oleh agen merupakan hal yang tidak menjelaskan dari kebenaran dari organisasi, maka akan timbulah sebuah asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Keadaan inilah yang dapat memberikan kesempatan

kepada pelaku khususnya pada bagian agen untuk melakukan kecurangan akuntansi, hal tersebut memberikan kesempatan kepada pihak agen demi memperoleh keuntungan pribadi (Setiawan,et. al, 2016).

Najahningrum (2013), menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kata lain semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi pada organisasi maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan terjadi. Asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur organisasinya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pengelola akan lebih mengetahui prospek dan informasi sehingga menimbulkan ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemilik yang disebut asimetri informasi. Bila terjadi asimetri informasi manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain (Najahnigrum, 2013).

Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, manajemen membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta rasio-rasio keuangan. Ardiana (2016). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Frilia, 2015; dan Azmi, 2017). Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, et.al , 2015; Fitri, 2015; dan Prasetyo,2013) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin rendah asimetri informasi maka akan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut diatas faktor

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi mewujudkan hasil yang tidak konsisten terhadap akuntabilitas keuangan organisasi. Terbentuknya sebuah variabel pengendalian internal dalam penelitian ini dari beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi yang memiliki hasil penelitian yang tidak konsisten, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi,et.al (2017), Friia (2015), Risky (2017) dan Adelin (2013) yang melakukan penelitian tentang efektifitas pengendalian internal, sedangkan ketaatan aturan akuntansi penelitian dilakukan oleh Risky, et.al (2017), Azmi, (2017), Indiasutik (2016) dan Sari et.al (2015), dan asimetri informasi bukti empiris yang tidak konsisten yaitu Setiawan, et.al (2015), Fitri (2015), dan Prasetyo (2013).

Berdasarkan ketidakkonsistenan bukti penelitian ini tersebut, ada hasil penelitian yang masih ada variabel yang bisa menjadi penyebab ketidak konsistenan. Kemungkinan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara beberapa variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya Toyibatun (2009) mengungkapkan bahwa akuntabilitas bisa memperkuat hubungan antara pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan salah satu bukti empiris tersebut maka dapat menambah variabel akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Variabel tersebut yang akan lebih memperjelas hubungan yang tidakkonsisten antara determinan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan organisasi, yang merupakan elemen konsekuensi dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Akuntabilitas diyakini mampu mewujudkan kondisi pemerintahan dari

yang tidak memberi pelayanan publik secara baik dan yang akan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis (Kemal, et.al, 2015). Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari pihak publik. Hal ini berarti bahwa pemerintahan akan mendapat kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan yang telah dilaksanakan. Ebebhoahon, et.al (2015) mengemukakan salah satu bentuk wujud akuntabilitas publik adalah akuntabilitas di bidang finansial, yang mengharuskan lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada para pengguna informasi keuangan. Febrianto (2017) mengungkapkan bahwa faktor akuntabilitas keuangan organisasi dapat tercermin dengan ketaatan dalam penyampaian laporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan karena para pegawai dalam menjalankan aktivitas keuangan diutamakan prinsip efisiensi dan pengawasan sesuai dengan peraturan standart akuntansi yang berlaku. Semakin tinggi akuntabilitas maka hubungan ketaatan pada aturan akuntansi akan maka akan mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi.

Ketika suatu organisasi sudah menjalankan tata kelola yang baik dengan mematuhi aturan akuntansi yang berlaku dalam organisasi, maka akan tercermin suatu akuntabilitas. Akuntabilitas pada organisasi publik merupakan akuntabilitas di bidang finansial, yang mengharuskan lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada para pengguna informasi keuangan (Ebebhoahon, et.al, 2015), sehingga dengan akuntabilitas para pengguna tidak akan terjadi lagi suatu ketidakselarasan atas informasi laporan keuangan, untuk memenuhi kepentingan diri sendiri antara agen dan prinsipal yang disebut asimetri informasi. Asimetri informasi dapat

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manipulasi, ketika manipulasi terjadi maka akuntabilitas keuangan tidak akan terjadi atau pun tidak baik. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto, 2007).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu bahwa penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan beberapa variabel yang secara umum sudah digunakan, seperti pengendalian internal, ketaatan aturan, moralitas, dan asimetri informasi. Tetapi pada penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi, dengan menambahkan variabel moderating untuk lebih memperkuat model penelitian. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan organisasi.

Berdasarkan fenomena ICW (Indonesia Corruption Word, 2018) menyebut Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak melakukan tindak korupsi pada 2017. Berdasarkan pantauan ICW, sebanyak 68 kasus korupsi dilakukan di Jawa Timur dan telah merugikan negara hingga Rp 90,2 miliar. Berdasarkan sektornya penyalahgunaan anggaran desa merupakan sektor paling banyak dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa. Di Jawa Timur kasus penyalahgunaan dana desa yang sangat fenomenal yaitu di kabupaten Pamekasan. Maka Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah di Pamekasan sebagai lembaga pemerintah memiliki ciri dan komunitas pegawai dari kepala daerah, yang bekerja sama dengan bagian pengendalian dan pengawasan, dan penegak hukumnya yang tidak akuntabel dalam penggunaan anggaran.

Sehingga akuntabilitas organisasi tidak akan terwujud dalam sebuah pelaporannya. Seperti fenomena yang telah terungkap diatas bahwa tentang akuntabilitas keuangan organisasi, dimana Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang melakukan *fraud*. Berdasarkan uraian ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi pada akuntabilitas organisasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
5. Apakah akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
6. Apakah akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris:

1. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk mendapatkan bukti secara empiris bahwa akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Untuk mendapatkan bukti secara empiris bahwa akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Untuk mendapatkan bukti secara empiris bahwa akuntabilitas bisa memoderasi pengaruh antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas terkait teori keagenan, teori pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis berupa pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi pada kecenderungan kecurangan akuntansi dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan meminimalkan asimetri informasi yang terjadi agar segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan instansi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi kecurangan akuntansi yang mungkin dapat terjadi. Pemerintah lebih meningkatkan akuntabilitas keuangan karena dengan akuntabilitas dapat mengurangi terjadinya kecurangan akuntansi dengan meningkatkan pengendalian internal dan mematuhi aturan akuntansi. Maka peneliti selanjutnya bisa menambah variable moderating lain untuk selanjutnya karena dengan akuntabilitas belum bisa membuktikan hubungan antara asimetri informasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Kemungkinan ada faktor variabel lain yang menjadi penyebab.